

Aktivitas BKKBN dalam Proses Pendistribusian dan Penyimpanan Perbekalan Kefarmasian Sediaan Injeksi dan Pil KB pada Masa Covid-19 di Pulau Lombok

Nisrina Noviatsyani¹, Sulistia Ardyati¹, Arief Rafsanjani^{1*}

¹Program Studi Farmasi, Fakultas Kesehatan, Universitas Hamzanwadi

*Corresponding author: Arief Rafsanjani email : ariefrafsanjani@hamzanwadi.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi merupakan faktor penting yang menentukan kesuksesan BKKBN menjalankan program KB. Pada situasi Indonesia ditengah pandemi Covid-19, salah satu alternatif sediaan kontrasepsi yang aman digunakan adalah pil KB. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi aktivitas BKKBN Provinsi NTB di masa Covid-19 dalam proses pendistribusian serta penyimpanan pada injeksi dan pil KB di tiga kabupaten di Pulau Lombok serta mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 terhadap proses tersebut. Jenis penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif yang menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Kepala Gudang BKKBN Provinsi NTB dan Bendahara Gudang OPD KB. Data sekunder adalah Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dan kartu stok injeksi maupun pil KB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendistribusian dan penyimpanan yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi NTB maupun OPD KB Kabupaten dapat dikategorikan baik berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 9 Tahun 2019. Proses pendistribusian dilaksanakan secara rutin dan non rutin berdasarkan hasil pelaporan rutin oleh OPD KB Kabupaten. Penyimpanan injeksi maupun pil KB dilakukan dalam ruangan ber-AC pada suhu 15-25°C dengan prinsip First Expired First Out (FEFO). Berdasarkan pada SBBK sebelum maupun ketika pandemi Covid-19 tidak menunjukkan adanya perbedaan pada proses pendistribusian dan penyimpanan untuk injeksi KB dan pil KB.

Kata kunci: Pengelolaan, injeksi KB, pil KB, BKKBN

ABSTRACT

Management of contraceptive devices and drugs is an important factor that determines the success of BKKBN in implementing the family planning program. In Indonesia's situation in the midst of the Covid-19 pandemic, one of the alternative contraceptives that are safe to use is the birth control pill. This study aims to evaluation the activities of the NTB Province BKKBN during the Covid-19 period in the distribution and storage process for injections and birth control pills in three districts on the island of Lombok and to find out whether or not there is an influence caused by the Covid-19 pandemic on the process. This type of research is a descriptive qualitative analysis that uses primary and secondary data. Primary data sources are the results of interviews with the Head of the NTB Province BKKBN Warehouse and the OPD KB Warehouse Treasurer. Secondary data are Proof of Goods Out (SBBK) and stock injection cards and birth control pills. The results showed that the distribution and storage process carried out by the NTB Provincial BKKBN and the Regency KB OPD can be categorized either based on BKKBN Regulation No. 9 of 2019. The distribution process is carried out routinely and non-routinely based on the results of routine reporting by the Regency KB OPD. Storage of injections and birth control pills is carried out in an air-conditioned room at a temperature of 15-25°C with the principle of First Expired First Out (FEFO). Based on the SBBK before and during the Covid-19 pandemic, there was no difference in the distribution and storage process for birth control injections and birth control pills.

Keywords: Management, KB injection, birth control pills, BKKBN.

PENDAHULUAN

Keluarga Berencana (KB) adalah suatu upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (UU Nomor 52, 2009). Pada pelaksanaan program keluarga berencana yaitu melalui pelayanan KB yang diberikan di berbagai unit pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah ataupun swasta dari tingkat kota hingga tingkat desa dengan kompetensi yang bervariasi. Pelaksanakan pelayanan KB oleh pemerintah, menjadi tugas dan tanggung jawab dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2005). Pada Data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017 dijelaskan bahwa peserta KB aktif di antara pasangan usia subur tahun 2017 sebesar 63,22%, sedangkan yang tidak menggunakan KB sebesar 18,63%. Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri tercatat sebesar 63,08% peserta KB aktif (Kemenkes RI, 2018). Data ini menunjukkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana, sehingga kebutuhan alat dan obat kontrasepsi harus tersedia dan terlaksana secara optimal.

Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi merupakan faktor penting yang menentukan kesuksesan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam menjalankan program KB. Proses pengelolaan alat dan obat kontrasepsi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen logistik yang diantaranya meliputi proses pendistribusian hingga proses penyimpanan. Tugas dan fungsi BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat salah satunya adalah mengelola alat dan obat kontrasepsi di tingkat provinsi hingga kabupaten dan begitupula sebaliknya pada tingkat kabupaten hingga ke tingkat fasilitas kesehatan. Penurunan jumlah pelayanan KB secara nasional dari masing-masing jenis alat dan obat kontrasepsi diakibatkan tengah terjadinya wabah virus Covid-19 yang membuat pelayanan KB menjadi terhambat serta adanya pembatasan kunjungan ke fasilitas kesehatan kecuali dalam kondisi darurat, sehingga salah satu alternatif sediaan kontrasepsi yang dapat digunakan secara aman di masa pandemi Covid-19 ini adalah sediaan pil KB.

Pada penelitian kali ini dilakukan analisis aktivitas BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat di masa Covid-19 dalam melakukan dan memantau proses pendistribusian sebagai pemenuhan permintaan sediaan injeksi KB maupun pil KB, serta proses penyimpanan di tiga OPD KB Kabupaten di Pulau Lombok baik dalam segi pengamatan pada kesesuaian data hingga keadaan langsung di lapangan (observasional) guna menjamin kualitas sediaan injeksi KB dan pil KB yang termasuk kedalam sediaan farmasi. Pemantauan yang dilaksanakan pada penelitian ini, terkait aktivitas pendistribusian serta penyimpanan yang dilakukan oleh BKKBN pada masa pandemi Covid-19 dilakukan guna mengetahui adakah perbedaan yang terjadi di dalam proses pemasokan pada saat pendistribusian dilakukan yang berpengaruh terhadap jumlah stok penyimpanan sediaan injeksi KB dan pil KB pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui aktivitas BKKBN dalam melakukan proses pendistribusian dan penyimpanan perbekalan farmasi pada sediaan injeksi dan sediaan pil KB ke beberapa OPD-KB Kabupaten di Pulau Lombok, serta untuk mengetahui perbedaan terhadap aktivitas BKKBN dalam melakukan proses pendistribusian maupun penyimpanan perbekalan farmasi pada sediaan injeksi dan sediaan pil KB di beberapa OPD-KB Kabupaten di Pulau Lombok pada masa normal dan ketika pandemi Covid-19.

METODELOGI

Jenis penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat diantaranya adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di tiga kantor perwakilan BKKBN di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi serta wawancara dengan narasumber terkait.

Metode

Observasi

Pada penelitian ini dilakukan observasi dengan cara mengamati proses distribusi oleh BKKBN Provinsi NTB ke beberapa OPD KB Kabupaten di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Selanjutnya, dilakukan observasi pada penyimpanan sediaan injeksi dan pil KB oleh beberapa Perwakilan BKKBN di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

Wawancara

Penyusunan kuisioner wawancara diambil dari Peraturan BKKBN RI Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur manajemen logistik terkait mekanisme pendistribusian, pelaporan, pencatatan, hingga penyimpanan. Narasumber pada wawancara ini yaitu Kepala Gudang BKKBN Provinsi NTB yang memberikan informasi terkait proses pendistribusian dalam memenuhi permintaan alokon dari masing-masing pihak gudang OPD KB Kabupaten

Dokumentasi

Proses dokumentasi selama penelitian observasional di lapangan dilakukan pada Gudang BKKBN Provinsi NTB dan OPD KB Kabupaten di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat

Analisis Data

Member Check

Kegiatan ini merupakan tahap seleksi dan penafsiran pada data primer berupa Surat Bukti Barang Keluar untuk sediaan injeksi KB dan pil KB yang didistribusikan pada masa normal maupun ketika masa pandemi Covid-19, yang diperoleh dari Gudang BKKBN Provinsi NTB dan Gudang Perwakilan BKKBN di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

Triangulasi Data

Triangulasi data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan sumber data yang berbeda-beda, data yang digunakan berasal dari dokumen distribusi barang (SBBK), hasil wawancara dengan bendahara barang di gudang alokon dari masing-masing OPD KB Kabupaten di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, serta hasil observasi lapangan yang dilakukan ketika melakukan peninjauan secara langsung ke masing-masing gudang alokon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dilakukan proses observasi yang dimulai dari proses pendistribusian hingga penyimpanan dari Gudang BKKBN Provinsi NTB hingga ke Gudang masing-masing OPD KB Kabupaten di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Proses observasi yang dilakukan pada penelitian kali ini dimulai dari proses penyaluran/pendistribusian injeksi KB dan pil KB, kemudian mekanisme pencatatan/pelaporan, proses penerimaan, hingga standar penyimpanan alokon.

Proses pendistribusian dilaksanakan setelah dilakukan pembaharuan kondisi stok atau rekapitulasi pada data F/V/KB oleh Bendahara Barang melalui sistem aplikasi Sirica. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan BKKBN RI Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur tentang pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan keluarga berencana. Adapun proses pendistribusian disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta permintaan yang di ajukan oleh Gudang OPD KB Kabupaten ke pihak Gudang Provinsi.

Pada hasil pengecekan data berupa Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) serta wawancara yang dilakukan dengan Sub Koordinator Keuangan dan BMN selaku penanggung jawab Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi di BKKBN Provinsi NTB dengan total pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan dan menggunakan pedoman wawancara yaitu Peraturan BKKBN RI No 9 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi NTB telah melakukan standar operasional prosedur pendistribusian yang dapat dikategorikan baik sesuai dengan Peraturan BKKBN RI Nomor 9 Tahun 2019.

Proses penerimaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dilakukan oleh Bendahara Barang Gudang Alokon di masing-masing OPD KB, sehingga narasumber pada wawancara terkait proses penerimaan alokon di tingkat kabupaten yaitu masing-masing Bendahara Barang di OPD KB Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat dengan total pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan dan menggunakan pedoman wawancara yaitu Peraturan BKKBN RI No 9 Tahun 2019. Pada hasil wawancara dijelaskan bahwa ketika proses penerimaan alokon yang dilakukan oleh pihak Gudang Alokon di Kabupaten, ideal nya dilakukan proses *double check* yaitu proses pemeriksaan alokon yang tercantum berdasarkan pada dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) maupun pada Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Injeksi KB serta Pil KB. Proses pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi pengecekan keadaan fisik kemasan, tahun produksi alokon, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Pada saat proses

pemeriksaan fisik sediaan, apabila ditemukan sediaan Injeksi KB dan Pil KB dengan kemasan yang rusak atau tidak sesuai dengan BAST dan SBBK maka akan dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh BKKBN Provinsi NTB. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa ketiga Gudang OPD KB tersebut telah melakukan standar operasional prosedur pendistribusian yang dapat dikategorikan baik sesuai dengan Peraturan BKKBN RI Nomor 9 Tahun 2019.

Pada hasil wawancara terkait proses pencatatan yang dilakukan di masing-masing gudang alokon kabupaten menggunakan pedoman Peraturan BKKBN RI No 9 Tahun 2019 dengan total 10 pertanyaan, diperoleh informasi bahwa proses pembaharuan kartu stok dan buku mutasi barang termasuk kedalam proses pencatatan. Fungsi utama kartu stok adalah sebagai pencatatan mutasi alat dan obat kontrasepsi yang memuat nomor bets, tanggal kadaluarsa, tanggal ketika alokon masuk dan keluar, serta jenis dari alokon tersebut. Fungsi buku mutasi barang merupakan buku pencatatan rekapitulasi transaksi berdasarkan Surat Barang Bukti Keluar atau Berita Acara Serah Terima ataupun dokumen referensi pengiriman lainnya dari setiap transaksi masuk ataupun keluar gudang yang dilakukan oleh Bendahara Barang. Proses pencatatan di Gudang OPD KB Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat dapat dikategorikan baik. Namun, didapatkan Gudang OPD KB Kabupaten Lombok Timur tidak melakukan proses pencatatan alokon pada buku mutasi barang.

Setelah proses penerimaan, maka proses yang dilakukan selanjutnya yaitu proses penyimpanan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai penyimpanan sediaan injeksi KB dan pil KB di OPD KB Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat diperoleh informasi bahwa ketiga Gudang OPD KB tersebut telah melakukan proses penyimpanan yang sesuai dengan SOP pada pedoman Peraturan BKKBN RI No 9 Tahun 2019. Pada OPD KB Kabupaten Lombok Tengah didapatkan gudang penyimpanan alokon yang tidak memiliki ventilasi udara, serta tidak terdapat pintu pengaman dengan tralis besi, dan tidak terdapat ruang penyimpanan sementara untuk menyimpan alokon apabila terjadi kelebihan penyimpanan pada ruang utama.

Pada rangkaian proses pendistribusian yang dimulai dari gudang alokon milik BKKBN Provinsi hingga proses penerimaan, pencatatan serta penyimpanan alokon di masing-masing Gudang OPD KB Kabupaten, nantinya akan melalui proses pendistribusian juga ke masing-masing jejaring dan faskes untuk memenuhi pasokan kebutuhan kontrasepsi bagi masyarakat. Rangkaian proses tersebut merupakan satu kesatuan dan akan berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan/SOP yang diberlakukan oleh BKKBN RI. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Barang di masing-masing OPD KB terkait proses pendistribusian yang dilakukan di gudang alokon kabupaten menggunakan pedoman Peraturan BKKBN RI No 9 Tahun 2019 dengan total 5 pertanyaan, dan diperoleh informasi bahwa proses pendistribusian alokon dilakukan oleh pihak Gudang OPD KB Kabupaten ke jejaring maupun faskes.

Adapun pendistribusian ini dilakukan berdasarkan hasil pencatatan serta pelaporan rutin yang dilakukan oleh jejaring maupun faskes. Rekapitulasi pencatatan serta pelaporan bertujuan untuk menghitung pencapaian program dan ketersediaan sediaan injeksi KB dan pil KB maupun jenis sediaan alokon lainnya setiap bulan. Gudang Alokon milik masing-masing ketiga OPD KB tersebut dapat dikategorikan baik, berdasarkan standar operasional prosedur pada proses penyaluran/pendistribusian Peraturan BKKBN RI Nomor 9 Tahun 2019.

KESIMPULAN (11pt)

Pendistribusian injeksi KB dan Pil KB dilakukan oleh BKKBN Provinsi NTB dilaksanakan berdasarkan distribusi rutin setiap tiga bulan sekali dan distribusi non rutin yang dilakukan, apabila ada permintaan mendesak atau darurat yang diminta oleh pihak Gudang Kabupaten kepada pihak Gudang Provinsi. Pada Proses pendistribusian yang dilakukan oleh Gudang Alokon di Kabupaten disalurkan ke Faskes dan Jejaring. Penyaluran/pendistribusian ini dilakukan berdasarkan hasil pencatatan serta pelaporan rutin yang diterima oleh OPD Kabupaten dari faskes maupun jejaring dan telah melewati rekapitulasi pencatatan serta pelaporan guna menghitung pencapaian program dan ketersediaan dari sediaan injeksi KB dan pil KB maupun jenis sediaan alokon lainnya setiap bulan.

Proses penyimpanan alokon harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dari Kepala BKKBN. Standarisasi gudang penyimpanan alokon pada sediaan seperti Injeksi KB, Pil KB, dan Implant harus disimpan pada ruangan berAC dengan suhu diantara 15-25 °C. Penyimpanan alokon dilakukan dengan beberapa prosedur seperti barang yang tidak terkait dengan sarana pendukung pelayanan alokon tidak diperbolehkan disimpan

bersamaan pada gudang. Alokon tidak boleh diletakkan langsung di atas lantai. Penyusunan Injeksi KB dan Pil KB dilakukan menggunakan prinsip FEFO (*first expired first out*)

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada pendistribusian alokon berupa injeksi KB dan pil KB yang dilakukan sebelum masa pandemi Covid-19 dan ketika masa pandemi Covid-19. Perbedaan jumlah yang tidak terlalu jauh tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan pada Surat Bukti Barang Keluar pada tahun 2019 (sebelum masa pandemic Covid-19) dan Surat Bukti Barang Keluar pada tahun 2021(masa pandemic Covid-19). SBBK mencakup jumlah alokon yang didistribusikan ke masing-masing kabupaten. Pada proses penyimpanan juga tidak mengalami pengaruh akibat masa pandemic Covid-19, karena jumlah pendistribusian alokon tidak mengalami perubahan ataupun adanya pengurangan jumlah yang didistribusikan.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. 2005. *Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. 2019. *Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta: BKKBN.
- Kementran Kesehatan RI. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Pasal 21 Ayat 1*. Jakarta: Kemenkes RI. Diakses dari <https://jdih.kemennppa.go.id/peraturan/uu%20no%2052%20tahun%202009.pdf> .
- Kementrian Kesehatan RI. 2018. *Profil Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI. Diakses dari <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-tahun-2017.pdf> .